

# KONFLIK CHINA-TAIWAN DAN KRISIS SISTEMIK INDO-PASIFIK: ESKALASI GEOSTRATEGIS, PERAN KEKUATAN BESAR, DAN IMPLIKASI BAGI TATANAN DUNIA

Oleh: Dr. Surya Wiranto, SH MH<sup>1</sup>

## Abstrak

Jika konflik China-Taiwan meningkat menjadi perang terbuka, maka yang terjadi bukan sekadar perang bilateral, melainkan krisis sistemik Indo-Pasifik yang berpotensi berkembang menjadi konflik global terbatas. Taiwan merupakan simpul geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi yang vital, terutama dalam arsitektur keamanan regional dan rantai pasok semikonduktor dunia. Artikel ini menganalisis pola eskalasi konflik China-Taiwan, peran negara-negara kunci yang mendukung Taiwan maupun China, serta implikasi strategisnya bagi stabilitas kawasan dan sistem internasional. Dengan pendekatan geostrategis, militer, dan hukum internasional, tulisan ini menunjukkan bahwa konflik tersebut akan berlangsung dalam bentuk perang terbatas berintensitas tinggi, ditandai operasi hibrida, keterlibatan multi-aktor, dan tekanan global simultan. Artikel ini juga menilai dampaknya bagi Asia Tenggara dan posisi strategis Indonesia dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif.

**Kata kunci:** China-Taiwan, Indo-Pasifik, perang terbatas, eskalasi strategis, keamanan regional, hukum internasional

## 1. Konteks Geopolitik dan Signifikansi Strategis Taiwan

Konflik China-Taiwan harus ditempatkan dalam konteks perubahan struktural tatanan internasional pasca-Perang Dingin, khususnya pergeseran dari dominasi unipolar Amerika Serikat menuju konfigurasi multipolar yang ditandai rivalitas kekuatan besar. Taiwan berada pada posisi strategis di *First Island Chain*, suatu konsep geostrategis yang sejak dekade 1950-an digunakan Amerika Serikat untuk membatasi proyeksi kekuatan maritim China dari pesisir daratannya ke Samudra Pasifik. Letak geografis Taiwan di antara Laut China Timur dan Laut China Selatan menjadikannya simpul pengendali jalur laut vital yang menopang perdagangan dan distribusi energi Asia Timur, termasuk Jepang dan Korea Selatan. Dengan demikian, penguasaan Taiwan tidak hanya berdimensi simbolik, tetapi berdampak langsung terhadap keseimbangan kekuatan laut dan udara di Indo-Pasifik Barat.

Signifikansi Taiwan semakin meningkat akibat perannya dalam ekonomi politik global, khususnya industri semikonduktor. *Taiwan Semiconductor Manufacturing Company* (TSMC) pada tahun 2023 menguasai lebih dari 90 persen produksi chip semikonduktor paling maju di dunia, terutama pada teknologi di bawah 7 nanometer,

<sup>1</sup> Penulis adalah Laksamana Muda TNI (Purn) Adv. Dr. Surya Wiranto, SH MH., Penasihat *Indo-Pacific Strategic Intelligence* (ISI), Anggota Senior Advisory Group IKAHAN Indonesia-Australia, Dosen Program Pascasarjana Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Indonesia, Ketua Departemen Kejuangan PEPABRI, Anggota FOKO, Sekretaris Jenderal IKAL Strategic Centre (ISC) dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Maritim Indonesia (IIMS). Beliau juga aktif sebagai Pengacara, Kurator, dan Mediator di firma hukum Legal Jangkar Indonesia .

yang menjadi fondasi industri pertahanan modern, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital. Ketergantungan negara-negara maju terhadap produksi semikonduktor Taiwan menjadikan stabilitas Selat Taiwan sebagai kepentingan global. Gangguan serius akibat konflik bersenjata akan memicu disrupsi rantai pasok global yang berpotensi melampaui dampak krisis energi atau keuangan sebelumnya.

Dari sudut pandang hukum internasional, status Taiwan berada dalam wilayah abu-abu yang kompleks. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2758 Tahun 1971 mengakui Republik Rakyat China sebagai satu-satunya wakil sah China di PBB, namun tidak secara eksplisit menentukan status kedaulatan Taiwan. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang interpretasi yang dimanfaatkan Beijing untuk menegaskan klaim reunifikasi, sementara negara-negara Barat menekankan pentingnya penyelesaian damai dan penolakan terhadap penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Dalam konteks ini, konflik China-Taiwan menjadi ujian terhadap efektivitas norma internasional dalam membatasi penggunaan kekuatan oleh negara besar.

## 2. Bentuk Awal Konflik dan Pola Eskalasi Militer

Jika konflik China-Taiwan meningkat menjadi perang terbuka, sangat kecil kemungkinan eskalasi diawali oleh invasi amfibi skala penuh. Secara militer, operasi semacam itu memiliki risiko tinggi dan membutuhkan superioritas udara dan laut yang absolut, yang sulit dicapai tanpa keterlibatan langsung Amerika Serikat. Sebaliknya, bentuk awal konflik kemungkinan besar akan dimulai melalui blokade maritim dan udara terhadap Taiwan. China dapat mengerahkan PLA Navy, China Coast Guard, serta *militia* maritim untuk mengontrol lalu lintas laut dan udara dengan dalih penegakan hukum domestik. Tujuan utama dari strategi ini adalah melumpuhkan ekonomi dan logistik Taiwan, sekaligus menciptakan tekanan psikologis yang signifikan tanpa secara langsung memicu deklarasi perang formal.

Selain blokade, China memiliki kemampuan untuk melakukan serangan presisi jarak jauh menggunakan rudal balistik dan jelajah seperti DF-16, DF-21, dan DF-26, yang dirancang untuk menargetkan pangkalan militer, infrastruktur kritis, serta sistem komando dan kendali Taiwan. Serangan semacam ini kemungkinan akan dikombinasikan dengan operasi siber dan peperangan elektronik untuk mengganggu komunikasi, sistem radar, dan jaringan pertahanan udara Taiwan. Pendekatan ini mencerminkan karakter perang modern yang mengedepankan kecepatan, presisi, dan dominasi informasi.

Operasi zona abu-abu akan tetap menjadi elemen sentral dalam fase awal konflik. Klaim hukum sepihak, latihan militer masif di sekitar Taiwan, tekanan ekonomi, dan kampanye disinformasi bertujuan menciptakan kebingungan strategis dan menguji ambang batas respons internasional. Invasi darat skala penuh baru akan dipertimbangkan Beijing apabila terdapat keyakinan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya tidak akan melakukan intervensi militer langsung. Dengan demikian, eskalasi konflik akan sangat bergantung pada persepsi dan kalkulasi strategis masing-masing pihak, yang membuka ruang besar bagi salah perhitungan.

### 3. Peran Negara Pendukung Taiwan dalam Konflik Terbuka

Amerika Serikat akan menjadi aktor kunci dalam setiap skenario perang terbuka China-Taiwan. Kepentingan utama Washington terletak pada menjaga kredibilitas aliansi global dan mencegah perubahan *status quo* regional melalui penggunaan kekuatan. Berdasarkan *Taiwan Relations Act* tahun 1979, Amerika Serikat berkewajiban menyediakan sarana bagi Taiwan untuk mempertahankan diri, meskipun tidak memberikan jaminan pertahanan eksplisit. Dalam konflik terbuka, keterlibatan AS kemungkinan berbentuk serangan udara dan laut terhadap armada China, perlindungan jalur laut strategis atau *sea lines of communication*, serta penyediaan intelijen, *surveillance, and reconnaissance*, senjata presisi, dan dukungan logistik. Namun, Amerika Serikat secara strategis akan menghindari serangan langsung ke daratan utama China guna mencegah eskalasi nuklir yang tidak terkendali.

Jepang akan berperan sebagai *frontline state* mengingat kedekatan geografis dan keterkaitan langsung antara keamanan Taiwan dan keamanan nasional Jepang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa dan Yokosuka menjadikan wilayah Jepang sebagai pusat operasi utama dalam konflik. Jepang kemungkinan akan memberikan dukungan pertahanan udara dan laut, logistik, serta intelijen, dengan keterlibatan militer yang bersifat defensif. Persepsi Jepang terhadap konflik Taiwan sebagai ancaman eksistensial didorong oleh fakta bahwa sebagian besar impor energi Jepang melewati Selat Taiwan, sehingga jatuhnya Taiwan akan secara langsung mengekspos Jepang terhadap tekanan strategis China.

Filipina akan memainkan peran penting melalui penyediaan akses pangkalan bagi Amerika Serikat berdasarkan *Enhanced Defense Cooperation Agreement*, serta penguasaan *choke points* strategis di sekitar *Luzon* dan *Bashi Channel*. Meskipun Filipina kecil kemungkinan terlibat dalam pertempuran langsung melawan China, dukungan tidak langsung terhadap operasi AS akan signifikan. Australia, melalui jaringan intelijen *Five Eyes*, dukungan logistik, dan kemampuan perang bawah laut, juga akan berkontribusi dalam kerangka aliansi. Sementara itu, peran NATO bersifat terbatas dan simbolik, dengan negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis memberikan dukungan politik, ekonomi, dan kehadiran maritim terbatas tanpa keterikatan Pasal 5.

### 4. Reaksi Negara Pendukung China dan Dinamika Multi-Front

Negara-negara yang mendukung China cenderung berperan secara tidak langsung, menciptakan tekanan strategis di berbagai kawasan untuk mengalihkan fokus Amerika Serikat dan sekutunya. Rusia, sebagai mitra strategis China namun bersifat oportunistik, tidak akan terlibat langsung dalam konflik di Selat Taiwan. Dukungan Rusia kemungkinan terbatas pada dukungan diplomatik, pertukaran intelijen, serta peningkatan tekanan di Eropa Timur, khususnya terkait Ukraina dan kawasan Baltik. Strategi ini bertujuan memaksa Amerika Serikat menghadapi dilema dua front yang menguras sumber daya dan perhatian.

Korea Utara berpotensi bertindak sebagai aktor pengganggu dengan meningkatkan provokasi rudal atau bahkan uji coba nuklir terhadap Korea Selatan dan Jepang. Langkah ini dimaksudkan untuk mengikat kekuatan militer Amerika Serikat di

Semenanjung Korea dan memperoleh konsesi politik atau ekonomi. Iran, meskipun tidak terlibat langsung, dapat menciptakan gangguan di Timur Tengah, terutama di Selat Hormuz, untuk menekan sekutu Amerika Serikat dan memperluas dampak global konflik.

China sendiri akan berusaha mengelola eskalasi secara hati-hati. Tujuan strategis utama Beijing tetap reunifikasi Taiwan, pengakhiran dominasi Amerika Serikat di Indo-Pasifik, dan pembentukan tatanan regional multipolar. Namun, China sangat berhati-hati terhadap eskalasi nuklir dan berupaya menghindari perang total global. Oleh karena itu, konflik kemungkinan besar akan dikendalikan dalam kerangka perang regional besar dengan intensitas tinggi namun terbatas.

## **5. Kemungkinan Menuju Perang Dunia dan Dampak Global-Regional**

Meskipun eskalasi konflik China-Taiwan membawa risiko besar, kemungkinan terjadinya perang dunia total relatif kecil. Namun, risiko perang regional besar dan perang hibrida global sangat tinggi. Konflik ini akan ditandai oleh ketiadaan deklarasi perang resmi, dominasi serangan presisi, sanksi ekonomi masif, serta fragmentasi rantai pasok global, khususnya semikonduktor. Dampak global mencakup krisis industri teknologi, lonjakan harga energi dan pangan, resesi global, serta polarisasi blok geopolitik yang semakin tajam.

Bagi Asia Tenggara, konflik ini akan mempercepat militerisasi Laut China Selatan dan memperdalam perpecahan internal ASEAN antara negara-negara yang cenderung mendukung Amerika Serikat dan mereka yang memilih sikap netral. Tekanan diplomatik terhadap negara-negara kunci seperti Indonesia akan meningkat, baik untuk memberikan dukungan politik maupun akses strategis. Dalam situasi ini, stabilitas kawasan akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara Asia Tenggara menjaga keseimbangan kepentingan dan mencegah eskalasi lebih lanjut.

## **6. Implikasi bagi Indonesia dan Kesimpulan Strategis**

Bagi Indonesia, konflik China-Taiwan menuntut penerapan politik luar negeri bebas aktif secara lebih substantif. Indonesia cenderung mempertahankan posisi netral aktif, namun netralitas tersebut tidak berarti pasif. Penguatan pertahanan laut dan udara menjadi keharusan untuk menjaga keamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan *choke points* strategis. Selain itu, Indonesia perlu memainkan peran aktif dalam diplomasi krisis dan *confidence-building measures* maritim di tingkat regional, sejalan dengan mandat Pembukaan UUD 1945 untuk berperan dalam menjaga perdamaian dunia.

Sebagai kesimpulan, konflik China-Taiwan merupakan ujian terbesar bagi tatanan dunia pasca-Perang Dingin. Amerika Serikat dan sekutunya akan berupaya mencegah perubahan *status quo* secara paksa, sementara China akan berusaha memenangkan konflik secara cepat dan terbatas. Negara-negara pendukung China akan menciptakan tekanan multipolar secara tidak langsung. Pemenang sejati dalam konflik ini bukanlah pihak yang paling kuat secara militer, melainkan pihak yang paling mampu mengendalikan eskalasi dan mencegah kehancuran sistemik tatanan internasional.

## **Daftar Pustaka**

1. Acharya, A. (2014). *The End of American World Order*. Cambridge: Polity Press.
2. Mearsheimer, J. J. (2014). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W. Norton.
3. Ministry of Defense of Japan. (2022). *National Security Strategy*. Tokyo.
4. United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. New York.
5. United Nations General Assembly. (1971). *Resolution 2758 (XXVI)*.
6. U.S. Congress. (1979). *Taiwan Relations Act*. Washington, D.C.